KUASA POLITIK PEREMPUAN: STUDI TENTANG DINAMIKA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PADA PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN GORONTALO

Jurisman M. Kadji[1], Abd. Qohar[2], Citra Wahyuni[3]
[1]IAIN Sultan Amai Gorontalo, [2,3] UIN Raden Intan Lampung
[1]jurisman@iaingorontalo.ac.id, [2]abdul.qohar@radenintan.ac.id,
[3]citrawahyuni@radenintan.ac.id

Diterima: 8 Mei 2024 Disetujui: 25 Mei 2024 Dipublikasikan: 25 Juni 2024

Abstract

Women's participation in politics, especially in Indonesia, is often faced with various challenges, two of which are patriarchal culture and religious interpretations. In this study, the author outlines some important findings related to the patterns and practices of power that occur. This research examines the dynamics of women's leadership in Islamic political parties. By taking a case study on the National Awakening Party (PKB) and the National Mandate Party (PAN) in Gorontalo district. The purpose of this research is to explain the process and obstacles that affect women's leadership in Islamic political parties in Gorontalo. The type of research used is qualitative research with a case study research method, which is an in-depth research approach to a case or phenomenon to show the influence of women's leadership in Islamic political parties and political power, leadership dynamics in Gorontalo. The results of this study conclude that: Women's leadership in politics still faces many challenges, such as gender stereotypes, lack of family support, and limited access to networks and resources. Nevertheless, women's leadership also has the potential to bring positive changes in politics, such as diverse perspectives, increased female voter participation, and a focus on women's issues.Factors that influence women's leadership in politics include culture and tradition, resource capacity, and political party support. To increase women's participation and leadership in politics, joint efforts from various parties are needed, such as campaigns that focus on women's issues, systematic efforts to empower women in political parties, and family and community support.
Keywords: Women's Leadership, Islamic Political Parties, Gorontalo

Abstrak

Keikutsertaan perempuan dalam ranah politik khususnya di Indonesia kerap kali dihadapkan dengan berbagai tantangan, dua di antaranya adalah budaya patriarki dan tafsir agama. Dalam penelitian ini, penulis menguraikan beberapa temuan penting terkait dengan pola dan praktik kekuasaan yang terjadi. Penelitian ini mengkaji tentang dinamika kepemimpinan perempuan dalam partai politik Islam. Dengan mengambil studi kasus pada partai kebangkitan bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di kabupaten Gorontalo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses dan hambatan apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan dalam Partai politik Islam di Gorontalo. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yakni pendekatan penelitian yang mendalam terhadap suatu kasus atau fenomena untuk menunjukan pengaruh kepemimpinan Perempuan dalam partai politik islam maupun kuasa politik, dinamika

kepemimpinan di Gorontalo. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Kepemimpinan perempuan dalam politik masih menghadapi banyak tantangan, seperti stereotip gender, kurangnya dukungan keluarga, dan keterbatasan akses terhadap jaringan dan sumber daya. Meskipun demikian, kepemimpinan perempuan juga memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dalam politik, seperti perspektif yang beragam, peningkatan partisipasi pemilih perempuan, dan fokus pada isu-isu perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan dalam politik di antaranya budaya dan tradisi, kapasitas sumber daya, dan dukungan partai politik. Untuk meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam politik, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti kampanye yang berfokus pada isu perempuan, upaya sistematis untuk memberdayakan perempuan dalam partai politik, dan dukungan keluarga dan masyarakat.
Kata Kunci: Kepemimpinan Perempuan, Partai Politik Islam, Gorontalo

A. PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan dalam mengisi ruang publik merupakan isu penting yang selalu menarik dan tidak pernah berhenti dibahas. Sejarah mencatat awal partisipasi perempuan dalam interaksinya tidak lepas dari pro dan kontra. Pada awal masa nabi Muhammad Saw. Meski tidak lepas dari perdebatan namun nabi menempatkan Keberadaan perempuan bukan hanya dianggap sebagai istri atau pendamping. Tapi juga dipandang sama sebagai manusia yang memiliki kedudukan seperti laki-laki. Perempuan bukan hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki saja. Keberadaan perempuan sebagai pemimpin pun sudah dicontohkan mulai dari *ummul mukminin* Siti Aisyah yang memimpin perang jamal, Ummu Hani Al- Syifa yang bertugas menangani pasar di kota Madinah di masa Khalifah Umar Ibn- Alkhathab[1].

Di Indonesia, sejak masa pra kemerdekaan yakni sebelum negara ini hadir sebagai entitas kesatuan, perempuan telah tampil dalam bentuk kepemimpinan yang beragam. Sebut saja Cut Nyak dien, Ar- Raniri, Laksamana Malahayati. RA Kartini, Nyi Ageng serang, Dewi sartika dan masih banyak lagi para perempuan dengan Latar kedaerahan yang ada tampil menjadi pemimpin. Mereka mampu hadir menembus kekangan struktur politik dan pengaruh sosial budaya dan kemudian berhasil meraih posisi kepemimpinan politiknya[2] .

Meskipun banyak pihak yang meragukan kemampuan perempuan dalam kontestasi kepemimpinan politik, namun kemunculan Megawati sebagai seorang pemimpin politik berdampak pada meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik. Era reformasi tepatnya setelah presiden Abdurrahman Wahid lengser Partai politik yang selama ini

[1] Rohmatullah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara Yuminah."
[2] Sukarniti, "Peran Perempuan Di Dalam Dunia Politik."

sangat kental dengan unsur maskulinitasnya kini mulai berbenah. Seiring dengan hadirnya desentralisasi daerah dan mengairahnya rezim politik lokal[3]. Tak jarang kita menemukan beberapa perempuan tampil dalam konteks kepemimpinan di daerah. Beberapa daerah memiliki pemimpin kepala daerah perempuan yang berhasil tampil dalam kontestasi politik yang ada di kabupaten, kota, dan juga provinsi.

Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan partai politik Islam di Indonesia penting karena dapat memberikan perspektif yang beragam dan inklusif dalam pengambilan keputusan politik[4]. Namun demikian, keterwakilan perempuan dalam partai politik Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan rendahnya jumlah perempuan dalam posisi politik meliputi faktor-faktor seperti kurangnya motivasi, budaya patriarki, finansial yang terbatas, dan pragmatisme partai politik[5].

Tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mencapai representasi yang memadai dalam pemilihan partai politik sangat kompleks[6]. Pertama, motivasi kandidat perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif dipengaruhi oleh interaksi antara harapan masyarakat, aspirasi pribadi, dan hambatan yang dihadapi untuk masuk ke ranah politik. Kedua, budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat Indonesia menjadi hambatan besar bagi partisipasi politik perempuan, membatasi peluang mereka untuk maju dalam partai politik. Selain itu, keterbatasan modal finansial juga memperparah tantangan yang dihadapi oleh kandidat perempuan, karena pendanaan yang memadai sangat penting untuk melancarkan kampanye pemilihan yang efektif. Selain itu, pragmatisme yang ditunjukkan oleh partai politik merupakan hambatan signifikan bagi representasi perempuan, karena partai cenderung lebih memprioritaskan faktor lain dibandingkan kesetaraan gender saat memilih dan mendukung kandidat. Tantangan-tantangan inilah yang saling terkait dan menghalangi perempuan untuk mencapai representasi yang setara dalam pemilihan partai politik[7].

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di legislatif daerah juga disebabkan oleh lemahnya kapasitas kepemimpinan[8]. Kapasitas kepemimpinan yang lemah di kalangan kader perempuan menjadi tantangan

[3] Kadji dan Husnan, "Hegemoni Maskulinitas dalam Politik : Studi Atas Representasi Perempuan pada Pemilu 2019 di Gorontalo."

[4] Rinaldo, "The Islamic revival and women's political subjectivity in Indonesia."

[5] Bela dan Utama, "Motivasi Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu."

[6] Ekawati. "Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca-Orde Baru." *Musãwa*

[7] Ekawati.

[8] Nurdin dan Fatkhuri. "Pelatihan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Kader Partai Politik Perempuan di Provinsi DKI Jakarta."

besar, membatasi kemampuan perempuan untuk bersaing secara efektif dengan rekan laki-laki dalam pemilihan legislatif. Dominasi peran laki-laki dalam partai politik dan lembaga legislatif, menciptakan lingkungan yang sulit bagi kader perempuan untuk maju. Sehingga pendidikan politik, pelatihan, dan program simulasi telah diidentifikasi sebagai alat yang efektif untuk memberdayakan kader perempuan partai politik dan meningkatkan peluang kesuksesan mereka dalam pemilu. Meskipun terdapat peningkatan partisipasi politik di kalangan perempuan di daerah-daerah tertentu, tidak lepas dari hambatan yang mengikuti, sehingga perlu upaya berkelanjutan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia[9].

Penelitian sebelumnya[10] telah menyoroti tren peningkatan partisipasi politik perempuan di Kota Tomohon tidak lepas dari kendala seperti persepsi bahwa perempuan kurang mumpuni dibandingkan laki-laki dalam politik, yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan diri dan sulit untuk maju di arena politik. Ideologi sosial, budaya, dan agama juga menjadi tantangan bagi perempuan dalam politik di Kota Tomohon, menghambat kemampuan mereka untuk mewujudkan diri secara politik. Sosialisasi peran gender turut berkontribusi pada kesulitan yang dihadapi perempuan dalam memperoleh hak politik yang sama dan dukungan dibandingkan dengan pria, memengaruhi keterlibatan politik mereka.

Di Provinsi Gorontalo, geliat tentang kuasa politik perempuan mulai dirasakan kehadirannya, meskipun belum signifikan persentasenya dibandingkan laki-laki. Beberapa perempuan hadir menjadi bagian dari suksesi kepemimpinan politik dan juga pemerintahan di Gorontalo. Nama-nama seperti Hana Hasanah, Rahmiyati jahja, Ida Syaidah, Dewi sartika Hemeto, Lola Junus, Ade Serah Rahim, Ningsih Nurhamidin, Suharsi Igrisa dan Merlan Uloli. Dua nama terakhir ini merupakan dua wakil kepala daerah pertama dari kaum perempuan hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan tahun 2020[11].

Data yang ada menunjukan pelaksanaan pilkada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menunjukan tren peningkatan. Hal ini menandai harapan masyarakat. Pada pilkada 2015 terdapat 23 calon kepala daerah perempuan yang terpilih dan kemudian meningkat Lima tahun berikutnya yakni pada pilkada 2022 dengan total 27 perempuan terpilih sebagai kepala daerah. Namun demikian tren ini bergerak sangat lambat. Hal ini

[9] Sidik dkk., "Perjuangan Perempuan Kota Tomohon Pada Kontestasi Politik Lokal."
[10] Sidik dkk.
[11] Sumirat, "Dua Wabup Perempuan di Gorontalo Jadi Warna Baru Pemerintahan."

mengindikasikan perkembangan keterwakilan perempuan dalam politik di Gorontalo menghadapi berbagai tantangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di partai politik seperti PKS di Gorontalo belum memenuhi kuota 30 persen yang disyaratkan oleh undang-undang karena faktor-faktor seperti peraturan yang tidak efektif, budaya patriarki, bias partai, dan keraguan pribadi perempuan[12]. Selain itu, temuan lain menyoroti rendahnya partisipasi politik perempuan di Gorontalo, dengan hambatan meliputi faktor internal seperti keputusan pribadi dan faktor eksternal seperti peran pembuatan kebijakan yang terbatas bagi perempuan dan hambatan budaya[13]. Pola kandidasi perempuan berada pada ruang pseudo yang inklusif dan tersentralisasi menjadi alasan tersendiri, di samping sulitnya perempuan meghadapi dominasi partai politik yang masih kental dengan budaya patriaki[14].

Penelitian lainnya[15] menyoroti keterbatasan politisi perempuan di DPRD Gorontalo untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan publik. Perempuan hanya terlibat sebagai peserta ketika kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dibahas, bukan dalam seluruh proses pembentukan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa politisi perempuuan di DPRD Gorontalo tidak maksimal dalam merumuskan kebijakan publik, yang mengindikasikan kurangnya peran mereka dalam proses tersebut. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pendidikan politik yang dapat memperkuat kapasitas politisi perempuan dalam merumuskan kebijakan secara efektif.

Di sisi lain, tafsir agama sering kali dimanfaatkan hanya untuk menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Apalagi jika para perempuan ini turut serta dalam suksesi kepemimpinan. Misalnya menjadi bupati, walikota, ataupun gubernur. Faktor corak budaya yang sangat patriarki ikut mempengaruhi. Padahal kalau dirunut dari sejarahnya di Gorontalo sendiri awal perkembangannya menjadi entitas politik pernah dipimpin oleh perempuan. Ada tiga kerajaan dari Lima Kerajaan *(Limo lo polo halaa)* yang dipimpin perempuan. Kerajaan Suwawa dipimpin Mbui Ayudugya, Kerajaan Limutu dipimpin Mbui Maimunah, dan kerajaan Hulonthalangi dipimpin Mbui Bulaida'a[16].

[12] Walahe, "Kekuatan Politik Perempuan dalam Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Gorontalo."
[13] Poma, Tueno, dan Katili, "Implementasi Program Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Gorontalo."
[14] Novitasari, Roni, dan Ardiansa, "Kepemimpinan Politik Delapan Kepala Daerah Perempuan: Tarik Ulur Relasi dan Identitas."
[15] Harun, "New Paradigm For Strengthening Women's Political Capacity in the Process of Public Policy Processing."
[16] Walahe, "Kekuatan Politik Perempuan dalam Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Gorontalo."

Meskipun ada banyak fakta dan data yang ditampilkan mengenai dampak positif yang ditimbulkan dari pola dan bentuk kepemimpinan perempuan dalam ruang publik dan politik. Selalu ada keraguan dan perdebatan yang menilai kelayakan perempuan dalam memimpin. Di Gorontalo sendiri dalam lokus penelitian yang dilakukan terdapat perempuan yang terpilih sebagai ketua partai politik dengan latar belakang yang berbeda. Narasumber pertama merupakan seorang pengusaha, juga kader partai politik yang dikenal cukup lama mengawali karir politiknya. Hingga dua periode berada di parlemen daerah sebelum kemudian terpilih menjadi ketua Partai amanat nasional (PAN) Kabupaten Gorontalo[17].

Narasumber lainnya merupakan ketua partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan latar belakang pengusaha, yang juga dikenal sebagai istri dari birokrat kawakan di Kabupaten Gorontalo. Menariknya dari konteks kepemimpinan perempuan ini, keduanya merupakan pemimpin dari partai politik Islam yang ada di kabupaten Gorontalo. Tiga partai politik lain yang dikenal dengan Identitas parpol Islam seperti partai persatuan pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB) semuanya didominasi oleh anggota laki-laki.

Kesempatan perempuan untuk tampil dalam kekuasaan politik tidak bisa dinilai sebagai sebuah peristiwa biasa. Tentu ada alasan dan pertimbangan penting dari partai politik dalam hal ini. Mengapa kesempatan yang sama tidak hadir pada partai politik lain?. Apakah kendala dan hambatan peluang kepemimpinan itu tidak terjadi?

Oleh sebab itu, peneliti menilai sangatlah penting untuk menghadirkan ruang kesadaran ini pada ranah politik lokal. Bagaimana mengurai ini secara ilmiah bukan hanya pada Perdebatan antara boleh tidaknya perempuan tampil dan memegang kendali kepemimpinan namun lebih jauh lagi melihat peluang dan tantangan yang hadir ditengah masyarakat sebagai dampak dari pelibatan dan partisipasi politik perempuan dalam kontestasi kepemimpinan di ranah politik lokal. Apalagi hal ini terkait dengan kepemimpinan perempuan pada partai politik Islam yang ada di bumi serambi Madinah Gorontalo.

Berangkat dari uraian tersebut, tulisan ini akan membahas tentang Dinamika Kekuasaan pada tingkat lokal yakni tentang praktik kepemimpinan Perempuan dalam partai politik politik islam yang ada di Gorontalo. Dengan mengambil studi kasus pada

[17] Makanoneng, "Ningsih Nurhamidin Jadi Perempuan Pertama Nahkodai PAN Kabupaten Gorontalo - Kronologi.id."

partai kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Gorontalo.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yakni penelitian yang mendalam terhadap suatu kasus atau fenomena tertentu[18]. Metode ini dipilih dengan harapan agar penulis dapat menggambarkan dan memaparkan keadaan serta fenomena yang sebenarnya terjadi. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif kualitatif yakni "suatu jenis pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu secara utuh. Selanjutnya, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder yang dianggap relevan dengan objek penelitian. Sementara untuk teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara mendalam sebagai alat utama, ditunjang dengan observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara mendalam memahami dan menginterpretasikan fenomena kepemimpinan perempuan dalam partai politik di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkaji dinamika kepemimpinan perempuan dalam partai politik Islam di Kabupaten Gorontalo dalam hal ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di kabupaten Gorontalo. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif tentang suatu kasus atau fenomena yang kompleks.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode, data dikumpulkan melalui berbagai metode, meliputi: (i) wawancara, dilakukan dengan ketua partai politik perempuan di Kabupaten Gorontalo; (ii) observasi, dilakukan di kantor partai politik dan kegiatan yang terkait dengan kepemimpinan Perempuan; (iii) studi dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam partai politik di Kabupaten Gorontalo. Dokumen

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*.

yang dikumpulkan termasuk profil ketua partai politik perempuan, berita tentang kegiatan partai politik, dan dokumen internal partai politik.

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan metode dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang sesuai. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi data, dan analisis tematik. Hasil analisis data kemudian disinkronkan dengan permasalahan dinamika kepemimpinan perempuan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Sinkronisasi ini dilakukan dengan cara menghubungkan temuan penelitian dengan konteks sosial dan politik di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan sistematis tentang dinamika kepemimpinan perempuan dalam partai politik Islam di Kabupaten Gorontalo. Gambaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang kepemimpinan perempuan dalam politik Islam dan dapat digunakan untuk merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Kepemimpinan Perempuan dalam Partai Politik Islam

1.1 Gambaran Kepemimpinan Perempuan

Salah satu poin penting dalam membicarakan kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dengan sejarah awal kemunculan pemimpin perempuan di Indonesia. Kepemimpinan perempuan di era kemerdekaan adalah periode penting dalam sejarah berbagai negara yang merdeka dari penjajahan, termasuk Indonesia. Pada masa ini, perempuan memainkan peran yang sangat signifikan dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan pembentukan negara baru. Banyak perempuan Indonesia, aktif dalam pergerakan kemerdekaan.

Mereka terlibat dalam demonstrasi, kampanye politik, dan aksi perlawanan terhadap penjajah. Contohnya, perempuan Indonesia seperti *Kartini, Nyai Ahmad Dahlan, dan Maria Ulfah Santoso, Maria Walanda Maramis* yang aktif memainkan peran penting memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender dan dalam gerakan kemerdekaan. Mereka terlibat aktif dalam berbagai organisasi politik dan nasionalis yang mendukung kemerdekaan. Para perempuan ini memegang peran penting dalam pembentukan organisasi politik, seperti Sarekat Islam dan Partai Nasional Indonesia (PNI), serta memobilisasi Massa untuk mendukung perjuangan kemerdekaan.

Dalam konteks kesejarahan ini. Pendidikan menjadi alat penting dalam mengembangkan kesadaran politik di kalangan perempuan. Kartini, misalnya, mendorong

pendidikan perempuan dan pengembangan kesadaran politik melalui surat-suratnya yang terkenal. Kesadaran Akan Pendidikan membantu perempuan mengambil peran aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Pada prosesnya, Seiring dengan perjuangan untuk kemerdekaan, perempuan juga berjuang untuk hak-hak mereka. Mereka memperjuangkan hak memilih dan terlibat dalam penyusunan konstitusi yang memastikan hak-hak perempuan di masa depan.

Kepemimpinan perempuan di era kemerdekaan adalah bukti nyata bahwa perempuan memiliki kemampuan yang besar dalam perjuangan politik. Peran mereka dalam meraih kemerdekaan dan pembentukan negara menjadi sangat penting. Apa yang dilakukan para perempuan ini menjadi warisan yang terus mempengaruhi peran perempuan dalam politik dan masyarakat hingga kini

Kepemimpinan politik perempuan pasca kemerdekaan Indonesia mencerminkan perkembangan penting dalam sejarah politik Indonesia. Setelah merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945, banyak perempuan Indonesia mulai berperan aktif dalam politik dan pemerintahan. Perempuan ikut andil dalam awal proses proklamasi kemerdekaan. Perempuan Indonesia berperan penting dalam momen bersejarah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Salah satu contohnya adalah Fatmawati Soekarno, istri dari Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Beliau turut serta dan dalam pembuatan bendera yang dikibarkan dalam proklamasi.

Pada era awal kemerdekaan tepatnya Pada tahun 1955, Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama, dan perempuan pertama kali memiliki hak pilih dan dipilih. Pemilu ini membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam politik nasional. Mereka kerap memperjuangkan isu-isu seperti kesetaraan gender, perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan, akses perempuan ke pendidikan dan pekerjaan, serta kesejahteraan anak-anak. Isu-isu sosial, pendidikan dan kesehatan paling dominan disampaikan hingga pada masa setelah itu yakni memasuki era orde baru.

Pada masa ini meskipun ada kemajuan dalam akses perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, partisipasi politik perempuan masih sangat terbatas. Pemerintah orde baru mendirikan berbagai organisasi perempuan, misalnya Dharma Wanita persatuan yang sejatinya tujuan untuk mengatur dan mengorganisir perempuan. Walaupun dalam prakteknya seringkali digunakan untuk mendukung agenda politik rezim kekuasaan. Peran perempuan pada era ini tidak bisa lepas dari pengaruh yang kuat dari Ibu Tien Soeharto. Sebagai ibu negara saat itu beliau sangat kuat pengaruhnya dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

1.2 Tantangan kepemimpinan Perempuan

1. Stereotype Gender dalam Mencapai Posisi Tertinggi

Tantangan kepemimpinan perempuan adalah isu yang penting dalam beberapa tahun terakhir ini. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam memerangi ketidaksetaraan gender, stereotip gender masih menjadi penghalang besar bagi perempuan yang ingin mencapai posisi kepemimpinan tertinggi. Utamanya bila dikaitkan dengan kepemimpinan politik perempuan. Partisipasi politik perempuan dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai macam kebutuhan dan kepentingan untuk dapat terakomodasi dalam berbagai output kebijakan.

Stereotip gender ini membentuk pandangan atau prasangka yang mendasari peran sosial yang diharapkan dari perempuan dan laki-laki. Kondisi Ini menciptakan harapan tentang bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berperilaku dan berperan dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, stereotip ini mengarah pada pengharapan bahwa perempuan harus fokus pada peran tradisional di rumah, sementara laki-laki diharapkan untuk memimpin di tempat kerja[19].

Dinamika tantangan kepemimpinan ini masih nampak dalam struktrur partai politik yang sedari awal kemunculannya sangat maskulin. Meski saat ini perlahan mulai terjadi pergeseran

> Secara umum perempuan mempunyai kegiatan menjadi seorang ibu rumah tangga keterbatasan ini jika dilihat dari kepemimpinan yang ada sekarang itu terbantahkan karena pemimpin perempuan yang ada mampu membagi waktu sehingga tidak terkendala dalam mengurus partai.[20]

Fakta yang ada, perempuan seringkali dihadapkan pada pertentangan didalam keluarga yang masih menganggap tugas utama perempuan adalah wilayah domestik dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh para informan tentang tantangan yang dialami perempuan ketika dia menjadi pemimpin dalam partai politik.

> Tantangan terbesar itu dari keluarga atau restu keluarga, suami, dan orang terdekat dalam keluarga. Karena perempuan harus di tuntut dengan dua peran

[19] Hasanah dan Suprianik, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender."
[20] Wawancara dilakukan oleh penulis bersama tim dengan Ketua PKB kabupaten Gorontalo, tentang dinamika tantangan kepemimpinan perempuan dalam Partai Politik, *2 Juni 2023*

> bersamaan yaitu peran sebagai ibu rumah tangga dan pimpinan partai sehingga harus pandai mengatur waktu. [21]

Stereotip gender memiliki dampak besar pada karier perempuan. Hal ini dapat memperlambat kemajuan perempuan dengan menciptakan keraguan dan hambatan yang seringkali tidak adil. Stereotip gender yang masih kuat di masyarakat seringkali menghambat partisipasi perempuan dalam dunia kepemimpinan. Mereka sering dianggap kurang mampu dibandingkan dengan pria, meskipun memiliki kualifikasi yang sama. Pandangan diskriminatif ini kemudian berdampak pada kesempatan dan kemungkinan perempuan untuk mencapai posisi puncak dalam suatu organisasi seperti halnya laki-laki

> Hambatan unik yakni rasa percaya diri masih kurang padahal perempuan itu mampu sebenarnya tergantung lingkungan dan motivasi kita. Saat ini yang saya lihat ketua PAN dapat memposisikan diri sebagai ketua partai sangat obyektif tidak memilih dan memandang gender komukasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dan bisa mengakomodir berbagai macam kepentingan dari perempuan dan lelaki.[22]

Meskipun anggapan masyarakat masih ada dikotomi tentang kemampuan memimpin perempuan terkait hal yang bisa dan tidak bisa dikerjakan. Namun yang menarik di internal partai dalam riset ini sebagian besar informan merasa. Mereka punya kepedulian dan komitmen yang baik terhadap pengurus dan anggota partai lainnya.

2. Keterbatasan Akses dalam Jejaring dan koneksi

Tantangan kepemimpinan politik perempuan memang masih dihadapi hingga saat ini, salah satunya adalah keterbatasan akses dalam jejaring dan koneksi. Perempuan yang memiliki akses ke jaringan politik yang kuat cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mencapai posisi kepemimpinan. Dalam kenyataanya jejaring politik adalah aset berharga dalam prakteknya bagi para calon pemimpin dan pemimpin politik. Keterbatasan akses kejaringan politik dapat mengisolasi perempuan untuk mendapatkan dukungan politik.

Hal ini terungkap dari wawancara yang peneliti lakukan dengan informan kunci dalam riset ini. Rekomendasi dari para aktor politik melalui komunikasi yang intens

[21] Wawancara penulis dengan Ketua PAN kabupaten Gorontalo, tentang dinamika kepemimpinan perempuan dalam Partai Politik Islam, *11 Juni 2023*

[22] Wawancara dilakukan oleh penulis bersama tim dengan pengurus partai PAN kabupaten Gorontalo, tentang dinamika tantangan kepemimpinan perempuan dalam Partai Politik islam, *17 Juni 2023*

menjadi sangat penting untuk bisa membuat setiap orang masuk dan diterima dalam jajaran elit partai. Apalagi jika partai tersebut masuk dalam top partai yang mengisi parlemen seperti partai Amanat Nasional (PAN) kabupaten Gorontalo. Posisi ketua partai yang cukup strategis membuat setiap kandidat akan bertarung dan berupaya masuk dalam lingkungan elit politik untuk mendapatkan dukungan.

> Kalau di kami partai politik PAN ada penialaian tersendiri dari kita punya ketua umum. Semua kandidat ada penialaian. Saat saya akan mengikuti pemilihan ketua DPD PAN kabupaten Gorontalo. Ketua DPW menyampaikan arahan ketua umum. Kalo yang nantinya menjadi ketua partai dia harus anggota dewan. Semua persyaratan saya penuhi.[23]

Perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya politik dan finansial yang diperlukan untuk membangun jejaring politik yang kuat. Hal ini bisa berupa akses terhadap dana kampanye, pelatihan politik, atau dukungan dari partai politik. Di sisi lain Budaya patriarki yang masih kuat di banyak kasus seringkali membuat perempuan sulit untuk masuk ke dalam lingkaran kebijakan politik yang sudah ada. Koneksi dan jejaring politik seringkali didominasi oleh laki-laki, dan perempuan seringkali dianggap kurang mampu untuk kemudian terlibat dalam bidang ini. Selain itu, Banyak perempuan yang memiliki peran ganda sebagai ibu, istri, atau pekerja rumah tangga, sehingga mereka memiliki keterbatasan waktu dan energi untuk membangun koneksi dan mengembangkan jejaring politik.

1.3 Strategi dan Taktik Kepemimpinan Perempuan

1. Gaya Kepemimpinan Perempuan Membawa Perspektif Baru

Dalam prakteknya, kepemimpinan perempuan adalah elemen penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Perempuan memiliki pandangan dan pengalaman unik yang dapat membawa perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Hal ini kemudian akan memberikan perubahan positif dalam berbagai sektor dengan gaya kepemimpinan yang berbeda dari laki-laki.

Kepemimpinan politik perempuan membawa perspektif yang kaya dan beragam yang membentuk dunia politik dan masyarakat menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil. Hal ini terlihat dari gaya kepemimpinan perempuan didalam mendorong perubahan

[23] Wawancara penulis dengan Ketua PAN kabupaten Gorontalo, tentang dinamika kepemimpinan perempuan dalam Partai Politik Islam, *11 Juni 2023*

positif yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perempuan dalam kepemimpinan politik sering memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu gender dan kesetaraan. Hal ini sebagaimana diuraikan beberapa informan yang diwawancarai terkait dengan peran ini.

> Saya lebih memilih perempuan karena tujuan saya ingin memberikan porsi kepercayaan diri kepada perempuan. Disamping itu saya lebih mengedapankan kaum muda untuk tergabung dalam partai politik. Dengan melibatkan kader-kader dari berbagai lembaga dan badan otonom NU dengan mendorong program pemberrdayaan ekonomi perempuan.[24]

Dalam prakteknya, Mereka cenderung lebih peka terhadap masalah seperti diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, dan kesenjangan ekonomi gender. Selain itu, Kepemimpinan politik perempuan membawa gagasan inklusi sosial yang kuat. Mereka sering mengadvokasi untuk masyarakat yang lebih inklusif dan adil, termasuk memperjuangkan hak-hak minoritas dan kelompok marginal.

Pemimpin perempuan memainkan peran penting dalam pemberdayaan perempuan lainnya. Perempuan dalam kepemimpinan politik sering mendorong pengembangan program sosial yang lebih inklusif, seperti program pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah diakses oleh semua warga negara.

> Salah satu strategi partai dalam mendorong partisipasi perempuan yaitu dengan adanya program-program khusus untuk perempuan contohnya UMKM dan sasarannya ibu rumah tangga. Selain itu kami ikut serta didalam kelompok pengajian dan membentuk komunitas komunitas dalam masyarakat serta aktif dalam konseling keluarga terutama pasangan muda untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. [25]

Kepemimpinan politik perempuan dapat membawa perspektif yang berbeda dan beragam ke dalam proses pengambilan keputusan. Ini penting karena perempuan sering mengalami dunia dengan cara yang berbeda dari pria, dan memiliki pemahaman unik tentang isu-isu tertentu, seperti perawatan keluarga dan pekerjaan rumah tangga.

[24] Wawancara dilakukan bersama tim dengan informan ASR Ketua PKB kabupaten Gorontalo, tentang dinamika tantangan kepemimpinan perempuan dalam Partai Politik, *2 Juni 2023*

[25] Wawancara dilakukan bersama tim dengan informan pengurus PKB kabupaten Gorontalo, tentang strategi dan gaya kepemimpinan perempuan dalam Partai Politik islam, *17 Juni 2023*

2. Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan dan kesetaraan gender

Strategi kepemimpinan politik perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender. Peningkatan partisipasi dalam berbagai aspek pembangunan dengan jalan menduduki posisi penting dalam politik adalah salah satu cara yang dapat dilakukan perempuan untuk dapat membantu mengubah dinamika dalam struktur kepemimpinan.

Dengan mendorong pelibatan perempuan, mereka dapat mempromosikan kesetaraan gender dalam proses rekrutmen dan promosi politik. Ini dilakukuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk maju sama halnya dengan laki-laki. Strategi ini secara tidak langsung dapat memprofokasi perempuan lainnya untuk ikut terlibat dalam mengisi ruang-ruang strategis lainnya yang selama ini di isi oleh laki-laki.utamanya dalam struktur dan infrastruktur kelembagaan politik yang ada.

Kepemimpinan politik perempuan dapat menjadi sumber inspirasi bagi pemilih perempuan lainnya. Ketika perempuan melihat sesama perempuan yang berhasil dalam politik, mereka cenderung merasa termotivasi untuk ikut serta dalam proses politik. Ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih perempuan, karena mereka merasa bahwa suara mereka menjadi bagian penting. Seperti yang diuraikan oleh beberapa informan kunci dalam penelitian ini.

> Walaupun saya tidak mengajak, tapi masyarakatkan sudah tahu kalo ketua PAN ini perempuan. Mereka sendiri yang datang minta bergabung dalam PAN. Saat kegiatan musyawarah daerah banyak baliho saya yang terpasang dimana-mana, juga dipublikasikan dimedia. mungkin Karena saya perempuan mereka banyak yang datang sama saya minta dimasukan dalam pengurus partai. Seperti pensiunan ASN dan tokoh-tokoh masyarakat lain. [26]

Strategi lainnya yang dilakukan melalui kepemimpinannya, sebagai seorang Perempuan, juga seringkali berjuang untuk mengubah kebijakan yang mendiskriminasi atau tidak adil terhadap hak perempuan. Keberadaan Mereka dapat mempromosikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti dukungan penuh terhadap aturan yang melindungi hak-hak perempuan atau memberikan akses yang lebih baik ke

[26] Wawancara penulis dengan Ketua PAN kabupaten Gorontalo, tentang Strategi dan gaya kepemimpinan yang dilakukan pada Partai Politik, *11 Juni 2023*

pendidikan dan pekerjaan. Hal ini yang kemudian membuat mereka bisa terpilih kembali dalam ajang kontestasi politik elektoral yang dilakukan.

Kepemimpinan politik perempuan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran gender di masyarakat. Mereka dapat menggunakan posisi mereka untuk mengedukasi orang lain tentang isu-isu gender dan menggugah kesadaran akan pentingnya kesetaraan. Hal ini diungkapkan oleh informan kunci yang juga merupakan ketua partai dan anggota legislatif 3 periode di kabupaten Gorontalo.

> Meskipun tidak semua bisa saya akomodir namun kalo diprensentase komposisi perempuan 60 persen lebih banyak dari laki-laki untuk pengurus intinya. Bukan berarti saya mengabaikan laki-laki. Namun ketika saya perintah yang lebih aktif itu perempuan. [27]

Dengan demikian, kepemimpinan politik perempuan bukan hanya tentang mewakili perempuan dalam politik, tetapi juga tentang membawa perubahan positif dalam pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender. Peran mereka dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil

2. Faktor-faktor Kepemimpinan Perempuan dalam Partai Politik

Kepemimpinan perempuan dalam partai politik Islam dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, terdapat tiga faktor utama yang dianggap paling dominan dan mempengaruhi perempuan untuk dapat diterima sebagai pemimpin dalam partai politik. Khususnya partai politik Islam yang menjadi objek dan lokus penelitian. Ke tiga faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

2.1 Budaya dan Tradisi yang mempengaruhi persepsi publik

Budaya dan tradisi di banyak masyarakat yang berbasis Islam seringkali memiliki norma-norma yang menekankan peran tradisional perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat membatasi akses perempuan ke dunia politik. Masalah budaya patriarki dengan stereotip gender yang melekat di dalamnya masih menjadi salah satu

[27] Wawancara penulis dengan pengurus PAN kabupaten Gorontalo, tentang gaya kepemimpinan perempuan yang dilakukan pada Partai Politik, *11 Juni 2023*

faktor utama yang menghambat perempuan dalam politik. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan mengungkapkan adanya keraguan tentang posisi perempuan dan kapasitasnya dalam ruang politik. Keraguan ini datang utamanya dari kelompok konservatif yang ada dalam struktur masyarakat adat Gorontalo. Sebagaimana diuraikan dalam wawancara berikut.

> Kepemimpinan perempuan dipengaruhi oleh adat istiadat, bahwa perempuan tidak bisa memimpin. Masyarakat terutama dari kalangan adat merasa kenapa dia perempuan dijadikan pemimpin sementara nantinya kita sembah-sembah *eyanggu*. Statemen masyarakat seperti itu membuat perempuan ragu untuk jadi pemimpin. [28]

Persepsi masyarakat tentang peran tradisional gender sering kali mengarah pada pandangan bahwa perempuan lebih cocok untuk peran domestik keluarga daripada peran politik. Hal ini membuat perempuan sering dianggap kurang kompeten dalam bidang politik. Budaya patriarki menjadi salah satu temuan dari hasil riset ini. Secara kultural memang dominasi laki-laki dalam politik lokal sangat kental. Hal ini menyebabkan perempuan kurang termotivasi untuk turun langsung dan mengambil peran dalam partai politik.

> Dimasyarakat itu ada yang bilang Kalo perempuan yang pimpin partai itu akan mati, artinya akan turun surveinya. Tapikan saya optimis saja. Kita kan belum tau saya kan belum lima tahun. Nanti kita lihat hasilnya dipileg 2024. Saya akan buktikan bahwa partai PAN yang dipimpin oleh seorang perempuan akan lebih maju lagi.[29]

Lebih lanjut, dalam struktur masyarakat patriarki posisi perempuan seringkali dihadapkan pada tantangan peran ganda yang dimiliki perempuan. Di satu sisi memiliki hak-hak sipil termasuk politik untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Di sisi lain perempuan dilekatkan dengan fungsi internal dalam rumah tangga sebagai ibu yang melahirkan dan mengurusi anak-anak dan keluarga. Faktor ini menjadi alasan paling utama dalam temuan riset yang diuraikan oleh beberapa informan.

[28] Wawancara penulis bersama tim dengan pengurus Parti PAN kabupaten Gorontalo, tentang hambatan kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, *25 Juli 2023*

[29] Wawancara dengan Ketua PAN kabupaten Gorontalo, tentang hambatan utama kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, *25 Juli 2023*

> Dalam proses kandidat pemilihan ketua waktu itu. Ada yang memberikan masukan kepada ketum kenapa perempuan. Dia belum pantas untuk menjadi ketua DPD PAN karena dia perempuan, Saya merasa diremehkan, saya jawab kenapa kalo perempuan? emangnya perempuan tidak bisa memimpin. Selama saya menyadari dan bisa menyeimbangkan tanggung jawab saya diorganisasi dan juga kodrat saya sebagai ibu dirumah tangga kenapa tidak.[30]

Meskipun dalam beberapa hasil wawancara yang dilakukan ada kemajuan dalam tingkat penerimaan perempuan dalam kepemimpinan politiknya. Khususnya dalam partai politik Namun pengaruh budaya ini sangat terkait dengan keengganan perempuan untuk tampil menjadi pemimpin. Para ketua partai ini merasa meski internal partai mendukung keterlibatan dan partisipasi politik perempuan. Kebiasaan yang terbentuk menjadi tradisi di masyarakat menyulitkan peluang perempuan untuk tampil lebih tinggi lagi dalam kepemimpinan politik. Hal ini diungkapkan dalam temuan riset ini.

> Daerah kita inikan terkenal dengan adat dan budaya yang kental. Itujuga yang kadang membuat kita perempuan ragu. katanya tidak boleh pemimpin itu perempuan. Misalnya saya bermimpi untuk menjadi seorang bupati belum bisa harus saya pendam dulu. Karena adat bersendikan syarat itu. Saya rasa Tidak mungkin kami perempuan bisa jadi pemimpin daerah. Ada kendala di adat budaya Gorontalo. Kalo dalam tradisikan itu ada di prosesi adat. Ini sulit sekali. Masyarakat Gorontalo masih sulit menerima perempuan tapi kalo di posisi lain jadi ketua DPRD misalnya saya yakin bisa perempuan. Saya optimis kalau Allah SWT, mengizinkan kenapa tidak.[31]

Pola pikir patriarki cenderung menempatkan dominasi laki-laki. Perempuan masih dipandang lemah, kurang cerdas, dan akhirnya kalah bertarung dalam kontestasi politik. Ketua partai merupakan jenjang karir tinggi dalam partai politik. Mereka nantinya merupakan calon-calon potensial yang nantinya akan tampil dalam suksesi kepemimpinan politik di tingkat daerah maupun nasional. Mereka diproyeksikan bisa menjadi pemimpin di daerah.

Disisi lain, Para ketua partai ini harus memiliki pengetahuan politik dan kemampuan finansial untuk dapat membangun jejaring dan koneksi yang mendukung keberlangsungan partai politik. Oleh karena itu keberadaan perempuan menjadi pemimpin

[30] Wawancara penulis dengan Ketua PAN kabupaten Gorontalo, tentang tangtangan dan hambatan kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, *25 Juli 2023*

[31] Wawancara tim dengan pengurus PAN kabupaten Gorontalo, tentang hambatan utama kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, *25 Juli 2023*

partai politik menjadi tantangan tersendiri. Perempuan yang menduduki posisi strategis ini dituntut memiliki *resources* yang memadai baik dari sisi sosial dan ekonominya Sebagai faktor kedua yang menentukan keberhasilan kepemimpinan perempuan.

2.2 Kapasitas Sumber daya (*resources*) perempuan

Pengetahuan dan keterampilan politik perempuan berperan penting dalam menentukan kapasitas mereka untuk bersaing dalam dunia politik. Pengetahuan yang baik dan ketrampilan politik dapat meningkatkan kualifikasi perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki membuat perempuan bisa membangun relasi sosial dengan baik. Sebab hubungan dan jejaring sosial dalam politik sangat penting. Perempuan yang memiliki akses ke jaringan politik yang kuat cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mencapai posisi kepemimpinan. Oleh sebab itu. Penting bagi partai politik untuk memastikan hal ini.

> Orang-orang dalam partai poltik sudah tau kapasitas saya. Mereka tau kemampuan saya dan kami perempuan bisa buktikan itu. Waktu mengikuti seleksi ketua DPD saya bisa melengkapi semua persyaratan yang dimintakan. Dalam seleksi itu ada syarat yang mana kami harus mendapatkan persetujuan atau tandatangan dari para tokoh muhammdiyah yang ada. Saya bisa penuhi itu. Saya datangi satu persatu tokoh yang ada di Gorontalo. Ini permintaan partai supaya benar-benar yang menjadi ketua itu dikenal dikalangan ormas muhammadiyah. [32]

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perempuan dalam partai politik adalah terbatasnya pengetahuan dan kurangnya akses. Disamping akses sosial, akses ekonomi juga ikut menentukan kapasitas perempuan dalam memimpin. Akses terhadap dukungan finansial yang cukup sangat diperlukan oleh partai politik. Logistik yang memadai memungkin mesin partai bisa bekerja dengan baik. Kampanye politik memerlukan dana yang besar, dan perempuan seringkali kesulitan mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk bersaing dengan para politisi pria.

Hal ini terkonfirmasi dari temuan riset ini yang menjelaskan meski para ketua partai ini memiliki latar belakang yang berbeda namun keduanya memiliki kesamaan kemampuan *resources* yang tidak jauh berbeda. Kedua pemimpin partai politik ini

[32] Wawancara penulis dengan Ketua PAN kabupaten Gorontalo, tentang tantangan dan hambatan kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, *25 Juli 2023*

memang memiliki kapasitas yang memadai dari sisi akses sosial dan ekonominya. Ini menjadi pertimbanagan utama dari partai politik.

> Kapasitas Ningsih Nurhamidin sangat baik. Beliau merupakan kader PAN yang sudah dua periode terpilih menjadi anggota DPRD. Rekam jejak dalam membangun jejaring sosialnya sangat mumpuni dan tentu saja kemampuan akses finansial juga dimiliki. Latar belakang dari keluarga pengusaha sangat melekat dengannya. Ibu ketua ini menjadi contoh bagi masyarakat dan juga anggota partai untuk berpartisipasi dalam politik.[33]

Latar belakang pendidikan bukanlah hal yang utama. Pengetahuan politik yang dimiliki lebih kepada pengalaman sebagai dampak dari akses sosial yang menjadi *privilege* mereka. Basis sosial dan kapital yang kuat menjadi faktor utama. Keterpilihan nama Ade Sera rahim di usulkan oleh internal kader PKB. Mereka merupakan aktor kunci dipartai ini. Hasil penelusuran peneliti. Beberapa kandidat yang merupakan kader sebenarnya dimiliki oleh partai ini. Namun kendala utamanya adalah faktor kapasitas dan *isi tas* (modal).

Dari hasil penelitian ini, didapati indikator kapasitas sumber daya manusia dari sisi latar belakang pendidikan bukanlah menjadi faktor utama. Kemampuan para pemimpin perempuan ini lebih didasarkan pada kapasitas sosial dan finansialnya. Oleh sebab itu di beberapa hasil wawancara terungkap mereka para pemimpin perempuan ini belum sepenuhnya punya pengetahuan yang cukup tentang partai politik, bagaimana kekuasaan itu digunakan dalam kelembagaan politik apalagi terkait output kebijakan yang nantinya dihasilkan melalui tugas dan fungsinya di DPRD.

> Pasti ada hambatannya itu kita kurang sadari bahwa perempuan itu dibutuhkan keberadaanya dalam dunia politik. Mereka harus tampil mewakili suara perempuan kalau mereka tidak tampil siapa yang akan mewakili suara perempuan. [34]

Pada umumnya sumber daya perempuan dalam partai memang mengalami defisit yang cukup rendah. Apalagi ketika diperhadapkan tentang keahlian dan pengetahuan tentang politik. Sejauh ini sumber daya diukur hanya pada relasi sosial dan berapa banyak

[33] Wawancara penulis bersama tim dengan informan pengurus Partai PAN kabupaten Gorontalo, tentang hambatan kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, *11 juni 2023*

[34] Wawancara bersama tim dengan informan pengurus Partai PKB kabupaten Gorontalo, tentang hambatan kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, *10 juni 2023*

modal yang akan digelontorkan untuk pemenangan yang dimainkan dalam mendominasi efek *electoral* bukan pada substansi isi dari visi misi tujuan partai politik

2.3 Dukungan Partai Politik

Keberadaan partai politik sangat penting sebagai pilar demokrasi. Kepemimpinan perempuan dalam partai politik Islam hanya bisa diwujudkan bila partai politik dapat memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berperan dan berpartisipasi dalam berbagai tingkatan partai politik. Dukungan partai politik ini bisa terjadi hanya pada kondisi lingkungan partai yang inklusif dan progresif. Dalam kenyataannya, partai politik seringkali diidentikan dengan ruang strukturalisme yang sangat pragmatis. Konstruksi tersebut yang membuat masalah keterlibatan perempuan berpengaruh secara signifikan dalam ruang-ruang politik.

Dalam penelitian ini Ruang pragmatism itu seperti, terlihat dari tidak adanya proses kaderisasi dalam tubuh partai politik secara baik membuat partai politik kesulitan menempatkan kader perempuanya. Meskipun ada kader partai terpilih dalam kontestasi politik misalnya di menjadi anggota legislatif aleg DPRD namun ini bukan karena mereka adalah kader partai yang meniti jenjang karir di partai politik. Namun lebih kepada kemampuan perempuan itu sendiri memanfaatkan *resources* yang ada dalam dirinya. Seperti jejaring politik dan koneksi oligarkinya.

Pada penelitian yang dilakukan, dukungan partai nampak begitu baik dalam memberikan kesempatan terhadap perempuan untuk tampil dalam tingkatan kepemimpinan partai. Terlepas dari kultur masyarakat yang ada. Dalam kasus kepemimpinan partai PKB faktor stereotype Gender tidak Dominant ditemukan. Partai politik memberikan akses dan mendorong perempuan untuk terlibat dalam partai politik. Namun demikian hal yang perlu menjadi perhatian dalam penelitian ini terkait komitmen terhadap keseimbangan gender. Partai politik belum serius untuk mewujudkan komitmennya melalui usaha-usaha yang terarah dan sistematis dalam memaksimalkan pemberdayaan perempuan.

> Sekarang kita lagi mengisi kekurangan caleg perempuan, bukan tidak ada perempuan tapi yang awalnya ini terdaftar caleg potensial semuanya itu laki-laki. Saya sudah minta kepengurus untuk diseriusi ini. Hasil keputusan MK kan meminta penambahan caleg perempuan, karena pembulatan keatas yang gugatanya dimenangkan oleh Perludem. Sayangnya ketua ini hanya mendengar bisikan orang tertentu. Padahal ini sudah keputusan rapat partai. [35]

[35] Wawancara penulis bersama tim dengan informan pengurus Partai PKB kabupaten Gorontalo, tentang hambatan kepemimpinan perempuan pada Partai Politik, *8 Juli 2023*

Keterlibatan perempuan, hanya sebagai pelengkap ketentuan dari undang-undang yang mensyaratkan sejumlah 30% dalam keterlibatan pencalonan. Hal ini jelas tidak menyentuh substansi mengapa perempuan harus mendapat tempat yang layak dalam kancah percaturan politik. Dampak yang terjadi ketika keputusan MK dikabulkan terkait mekanisme pembulatan keatas maka sampai riset ini dilakukan. partai politik kesulitan untuk memenuhi syarat undang-undang.

Untuk itu, partai politik perlu mendorong program-program yang mempromosikan pemberdayaan perempuan. Menggencarkan kampanye yang berfokus pada isu-isu yang relevan bagi perempuan. Seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesetaraan gender yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam politik

D. KESIMPULAN

Perdebatan mengenai kepemimpinan seringkali dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan dan kemampuan yang dimiliki untuk mempengaruhi dan menggerakan orang lain. Kondisi ini menuntut seorang pemimpin harus memiliki kecakapan dan keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap lebih baik dari anggota biasa. Citra diri ini dibangun dan diidentikan dengan posisi laki-laki dalam konstruksi masyarakat yang patriarki.

Dalam penelitian mengenai kuasa kepemimpinan perempuan pada partai politik Islam di kabupaten Gorontalo. Ditemukan beberapa temuan menarik yang dapat diuraikan menjadi kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari tantangan dinamika kepemimpinan perempuan. Datang dari *stereotype Gender*. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam memerangi ketidaksetaraan gender, *Problem gender* masih menjadi penghalang besar bagi perempuan yang ingin mencapai posisi kepemimpinan tertinggi. *Streotype* ini muncul dari kelompok konservatif masyarakat adat, utamanya bila dikaitkan dengan kepemimpinan politik perempuan. Ini kerap kali menghambat partisipasi perempuan dalam meniti tingkatan kepemimpinan dalam partai. Tantangan terbesar lainnya yaitu datang dari keluarga atau restu keluarga, suami dan orang terdekat dalam keluarga. Kepemimpinan Politik masih dianggap sebagai dunianya laki-laki Mereka dianggap kurang mampu dibanding pria meskipun memiliki kualifikasi yang sama.

Selain itu, *Keterbatasan Akses dalam Jejaring dan koneksi* yang dimiliki menjadi tantangan perempuan untuk berpartisipasi. Perempuan yang memiliki akses ke jaringan politik yang kuat cenderung memiliki peluang lebih besar mencapai posisi kepemimpinan. Perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya politik dan finansial yang diperlukan untuk membangun jejaring politik yang kuat. Hal ini bisa berupa akses terhadap dana kampanye, pelatihan politik, atau dukungan dari partai politik.

2. Tantangan kepemimpinan perempuan yang terjadi justru menghadirkan strategi dan taktik kepemimpinan perempuan yang lebih adaptatif dan inklusif. Kehadiran perempuan dalam kepemimpinan politik menghadirkan gaya kepemimpinan dan perspektif baru dalam masyarakat. Kepemimpinan politik perempuan membawa persepsi yang beragam dalam membentuk pandangan politik masyarakat menjadi lebih inklusif terhadap perempuan dan isu-isu yang bias gender. Perempuan dinilai mampu meminpin sepanjang, memiliki kemampuan yang mumpuni dari sisi logistik finansial dan konektifitas jejaring yang kuat. Selain itu, Kehadiran perempuan cenderung lebih peka terhadap masalah seperti diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, dan kesenjangan ekonomi perempuan yang selama ini luput dari perhatian laki-laki. Disamping itu juga, Kehadiran perempuan mendorong dan meningkatkan partisipasi pemilih perempuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam berbagai aspek politik. Kepemimpinan politik perempuan dapat menjadi sumber inspirasi bagi pemilih perempuan lainnya. Ketika perempuan melihat sesama perempuan yang berhasil dalam politik, mereka cenderung merasa termotivasi untuk ikut serta dalam proses politik. Terutama terlibat aktif dalam partai politik.

3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan dalam partai politik islam di Kabupaten Gorontalo dalam kasus ini yakni dapat diuraikan kedalam tiga faktor utama yang dianggap paling dominan efeknya dalam temuan penelitian ini yaitu:

***Pertama,* Budaya dan tradisi yang mempengaruhi persepsi publik**. Problem budaya patriarki dengan stereotip gender yang melekat di dalamnya masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perempuan dalam politik. Kendala ini datang dari kelompok masyarakat adat. Anggapan tentang perempuan dalam kepemimpinan politik bertentangan dengan budaya dan tradisi yang di pegang. Sebagai daerah yang kental dengan adatnya. Perempuan dianggap tidak layak memegang jabatan tertinggi dalam politik. Persepsi masyarakat tentang peran tradisional gender sering kali mengarah

pada pandangan bahwa perempuan lebih cocok untuk peran domestik keluarga daripada peran politik. Hal ini menyebabkan perempuan kurang termotivasi untuk turun langsung dan mengambil peran dalam partai politik.

***Kedua*, kapasitas sumber daya *(resources)* Perempuan**, kapasitas ini sangat ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki perempuan. Dalam temuan riset, Pengetahuan yang baik dan ketrampilan politik dapat meningkatkan kualifikasi perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki tersebut, membuat perempuan bisa membangun relasi sosial dengan baik. Sebab hubungan dan jejaring sosial dalam politik sangat penting. Perempuan yang memiliki akses ke jaringan politik yang kuat cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mencapai posisi kepemimpinan. Utamanya dalam jejaring elite partai politik.

***Ketiga*, Dukungan partai politik**. Jika dilihat secara umum nampak cukup baik dalam memberikan kesempatan terhadap perempuan untuk tampil dalam tingkatan kepemimpinan partai. Terlepas dari kultur partai politik yang ada selama ini. Soal kepemimpinan ini faktor diskriminasi gender ini tidak Dominant ditemukan meskipun pada awal proses kandidasi kepemimpinan ketua partai ada riak penolakan. Namun secara struktural Partai politik memberikan akses dan mendorong perempuan untuk terlibat dalam partai politik. Khususnya dilakukan oleh partai Amanat nasioanal (PAN) Namun demikian hal yang perlu menjadi perhatian dalam penelitian ini terkait komitmen terhadap keseimbangan gender.

Partai politik belum serius untuk mewujudkan komitmennya melalui usaha-usaha yang terarah dan sistematis dalam memaksimalkan pemberdayaan perempuan. Akibatnya partai politik tidak memiliki regenerasi kader-kader yang potensial. Ini terjadi pada partai kebangkitan bangsa (PKB) Keterlibatan perempuan, hanya sebagai pelengkap ketentuan dari undang-undang yang mensyaratkan sejumlah 30% dalam keterlibatan pencalonan. Hal ini jelas tidak menyentuh substansi mengapa perempuan harus mendapat tempat yang layak dalam kancah percaturan politik. Dampak yang terjadi ketika keputusan MK yang terbaru dikabulkan terkait mekanisme pembulatan keatas maka partai politik kesulitan untuk memenuhi syarat undang-undang.

Oleh karena itu, agar problem internal partai politik ini tidak berulang lagi partai politik perlu melakukan terobosan dengan cara yang lebih sistematis melalui upaya menggencarkan kampanye yang berfokus pada isu-isu yang inklusif dan relevan bagi perempuan agar nantinya perempuan dapat lebih banyak berpartisipasi dalam politik.

REFERENCE

Bela, Herwin Sagita, dan Alip Susilowati Utama. "Motivasi Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu." *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK* 5, no. 2 (2020): 41–49.

Ekawati, Esty. "Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca-Orde Baru." *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2017): 67–80. https://doi.org/10.2307/20047958.

Harun, Nur Istiyan. "New Paradigm For Strengthening Women's Political Capacity in the Process of Public Policy Processing." *Journal of Governance* 4, no. 2 (26 Desember 2019). https://doi.org/10.31506/jog.v4i2.6526.

Hasanah, Hikmatul, dan Suprianik Suprianik. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender." *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman* 12, no. 1 (2019): 22–44. https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.6.

Kadji, Jurisman, dan Mohammad Ihsan Husnan. "Hegemoni Maskulinitas dalam Politik : Studi Atas Representasi Perempuan pada Pemilu 2019 di Gorontalo" 18 (2021): 116–41.

Makanoneng, Even. "Ningsih Nurhamidin Jadi Perempuan Pertama Nahkodai PAN Kabupaten Gorontalo - Kronologi.id." Diakses 13 Februari 2023. https://kronologi.id/2021/03/30/ningsih-nurhamidin-jadi-perempuan-pertama-nahkodai-pan-kabupaten-gorontalo/.

Novitasari, Mia, Roni, dan Dirga Ardiansa. "Kepemimpinan Politik Delapan Kepala Daerah Perempuan: Tarik Ulur Relasi dan Identitas." *Cakra Wikara Indonesia*. Jakarta, 2021.

Nurdin, Nurdin, dan Fatkhuri Fatkhuri. "Pelatihan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Kader Partai Politik Perempuan di Provinsi DKI Jakarta." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (11 Juli 2022): 539–49. https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i4.209.

Poma, Maryam D, Nolfi S Tueno, dan Andi Yusuf Katili. "Implementasi Program Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Gorontalo." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* VIII, no. 1 (2021): 105–13.

Rinaldo, Rachel. "The Islamic revival and women's political subjectivity in Indonesia." *Women's Studies International Forum* 33, no. 4 (2010): 422–31. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2010.02.016.

Rohmatullah, Yuminah. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara Yuminah." *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17 (2017): 80–113.

Sidik, Sangputri, Awaluddin Hasrin, Siti Fathimah, dan Sanita Carolina Sasea. "Perjuangan Perempuan Kota Tomohon Pada Kontestasi Politik Lokal." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 05, no. 1 (2023): 76–92.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Disunting oleh ke-3. Ke-3. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukarniti, Ni Luh Ketut. "Peran Perempuan Di Dalam Dunia Politik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 2, no. 1 (2020): 70–76. https://doi.org/10.47532/jic.v2i1.122.

Sumirat, Cahya. "Dua Wabup Perempuan di Gorontalo Jadi Warna Baru Pemerintahan." Diakses 13 Februari 2023. https://sulut.inews.id/berita/dua-wabup-perempuan-di-gorontalo-jadi-warna-baru-pemerintahan.

Walahe, Dewi. "Kekuatan Politik Perempuan dalam Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Gorontalo." *Gorontalo Journal of Public Administration Studies* 1, no. 1 (2018): 1–15.